

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA MENGENAI NEW COLOMBO PLAN 2006 – 2014

Bambang Wisnu Wibisono

20120510325

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Politik dan Sosial

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

bengwisnu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Asia – Pacific is a strategic region for Australia and tangle within since 1950's. On 1 July 1951, Australia and other Commonwealth countries establish Colombo Plan. Colombo Plan contributes a number of foreign students in Australia. Therefore on 2006, in Brisbane (Australia) held an international educational seminary of which sparks off idea regarding New Colombo Plan. This thesis discuss Australian foreign policy regarding New Colombo Plan conducts in 2014. According to Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and Burton Sapin, there are 3 factors determine foreign policy decision-making process : internal environment, eksternal environment, and decision-process. Those factors inter-alia : national interest, geographic, history and culture, leadership style of political parties ruling, politician, and constellations of international political, economic, and security. This thesis is a qualitative study sourced to primary and seconday data such books, journals, articles, etcetera. From this research ascertainable that Australian foreign policy regarding New Colombo Plan is determined by internal and external factors that enveloped

Keywords: Australian Foreign Policy, New Colombo Plan, Foreign Policy Decision-making Process

Kesadaran atas kedekatan geografis dan perbedaan demografis Australia dengan negara-negara tetangganya menarik perhatian Menteri Luar Negeri Australia (pada waktu itu), Percy Spender :

Secara geografis Australia bertetangga dekat dengan Asia dan takdirnya sebagai bangsa tidak dapat dihindari dikondisikan oleh apa yang ditempatkan di Asia. Ini artinya masa depan kami tergantung kepada derajat peningkatan stabilitas politik dari tetangga-tetangga Asia kami, kesejahteraan ekonomi rakyat Asia, dan pembangunan pemahaman dan hubungan antara Australia dan Asia. Selagi itu menyisakan kebenaran bahwa kedamaian adalah tak terpisahkan, dan itu terjadi pada setiap bagian di dunia yang dampaknya, kepentingan pokok kami lebih dekat. Oleh karena itu di Asia dan Pasifik bahwa Australia seharusnya membuat usaha utama dalam hubungan luar negeri. (J. Bishop 2013)

Untuk mewujudkan kesadaran itu, pada 1 Juli 1951 Australia bersama negara-negara persemakmuran lainnya membentuk *Colombo Plan*. “Colombo Plan adalah konsep kerjasama dari kemandirian dan kerjasama pembangunan yang dimaksudkan pada perkembangan sosial – ekonomi negara-negara anggotanya. (T. C. Secretariat, Overview 2011)” Colombo Plan dibentuk sebagai usaha kerjasama antarpemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan sosial masyarakat Selatan dan Asia Tenggara.

Perkembangan Colombo Plan menyisakan hal yang luar biasa. Beberapa dari 40.000 pemimpin masa depan datang ke Australia dari tahun 1950 hingga pertengahan 1980-an dan banyak perubahan yang telah kita lihat di wilayah kami selama puluhan tahun telah dipengaruhi oleh orang-orang yang – kembali dari negara ini - membantu untuk memimpin orang lain. (Derana, Exclusive : Organised People Smuggling business and Not A Refugee Issue - Australian Liberal party 2013)

Karena alasan-alasan itu pada tahun 2006 di Brisbane, Australia, diselenggarakan seminar pendidikan internasional yang diantaranya mencetuskan ide mengenai New Colombo Plan.

New Colombo Plan merupakan inisiatif tanda tangan dari Pemerintah Australia yang bertujuan untuk mengangkat pengetahuan tentang Indo Pasifik di Australia dengan mendukung mahasiswa Australia untuk belajar dan melakukan magang di wilayah tersebut. (Department of Foreign Affairs and Trade t.thn.)

(The New Colombo Plan is a signature initiative of the Australian Government which aims to lift knowledge of the Indo Pacific in Australia by supporting Australian undergraduates to study and undertake internships in the region.)

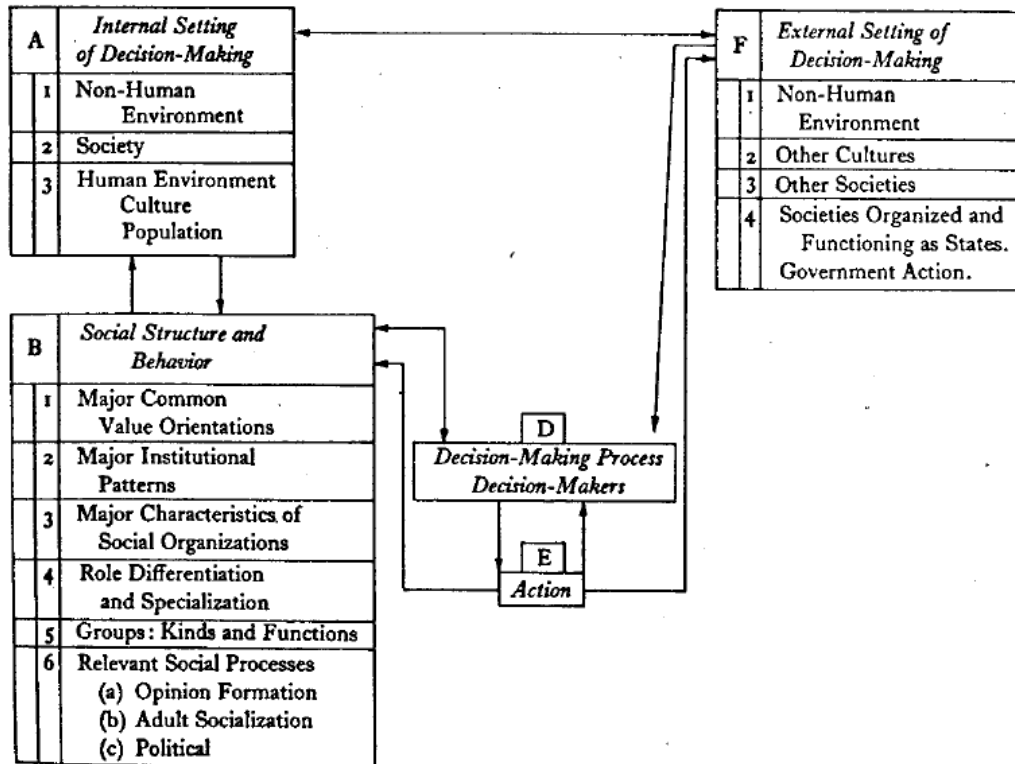
Kekalahan partai koalisi pada pemilihan umum (pemilu) Australia di tahun 2007 mengakibatkan New Colombo Plan ditunda untuk sementara waktu. Baru pada Pemilu tahun 2013, pemilu kembali dilaksanakan dan pada kesempatan ini partai koalisi berhasil memenangkannya. Tidak lama berselang, New Colombo Plan diresmikan pada akhir tahun 2013. New Colombo Plan dilaksanakan pada tahun 2014 di negara-negara lokasi tujuan program percontohan, yaitu Indonesia, Singapura, Jepang, dan Hongkong.

Tujuan penelitian ini adalah : Mengukur perbandingan kebijakan luar negeri Australia antara Colombo Plan dengan New Colombo Plan; Dan menganalisis faktor-faktor yang membentuk kebijakan luar negeri Australia mengenai New Colombo Plan. ruang lingkup penelitian KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA MENGENAI NEW COLOMBO PLAN 2006 - 2014. Penelitian dimulai dengan gagasan New Colombo Plan pada seminar pendidikan internasional di Brisbane, Australia, tahun 2006 hingga dilaksanakannya program percontohan ke Indonesia, Singapura, Hongkong, dan Jepang di tahun 2014. Dan penelitian tidak menafikan data yang berada di luar jangkauan apabila data itu masih sesuai dengan penelitian yang terkait.

Teori Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri

Perubahan kebijakan luar negeri Australia dari Colombo Plan kepada New Colombo Plan dapat dijelaskan melalui teori pembuatan keputusan politik luar negeri. “Pembuatan putusan adalah sekadar tindakan memilih alternatif yang tersedia yang disitu terdapat ketidakpastian. (James E. Dougherty 2014, 368)” Richard C. Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapling (Snyder dkk.) memberikan kerangka analitis untuk menjawab permasalahan tersebut yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Proses Pembuatan Keputusan Kebijakan Luar Negeri



Sumber : Mohtar Mas' oed. *Studi Ilmu Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisis*. (Yogyakarta : Pusat Antar Universitas - Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989). Hlm. 141.

Menurut Mohtar Mas' oed (Mas' oed, *Studi Ilmu Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisis* 1989, 141-142) terdapat 3 kelompok faktor pembuatan keputusan seperti dijelaskan gambar diatas : lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan proses keputusan. Lingkungan internal meliputi kotak A dan B yang terdiri seperti opini publik, kelompok dan institusi, kebudayaan nasional. Lingkungan eksternal meliputi kotak F yang disederhanakan dengan hanya memperhatikan unsur-unsur yang secara aktual dipandang atau dipertimbangkan perlu dalam memutuskan kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan.

Dan faktor ketiga adalah proses keputusan. Faktor ini kurang mendapat porsi dalam kerangka yang diajukan Snyder dkk.. Maka dari itu berikut ini unsur-unsur yang terdapat dalam proses keputusan :

- Definisi pembuat keputusan tentang situasi; yang berarti persepsi mereka.

- Ruang lingkup kompetensi, yaitu semua unsur yang mempengaruhi partisipasi dalam keputusan tertentu oleh individu. Ini merupakan karakteristik suatu organisasi atau unit pembuatan-keputusan, yaitu apakah ketat atau longgar, formal atau informal; apakah punya kemampuan untuk berubah atau tidak; sampai dimana tingkat birokratisasinya.
- Komunikasi dan informasi, yaitu jaringan komunikasi dalam suatu organisasi: siapa berkomunikasi dengan siapa; bagaimana komunikasi dilakukan; apa yang menghalangi komunikasi itu; berapa banyak komunikasi datang dari luar unit; seberapa luwes unit menerimanya.
- Motivasi; yaitu tujuan keseluruhan unit pembuat keputusan, norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh mereka yang ada dalam unit, dan nilai-nilai masyarakat. (Mas'ood, Studi Ilmu Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi 1989, 140-141)

Zulkifli Hamid (Hamid, Sistem Politik Australia 1999, 386) berpendapat bahwa faktor-faktor yang bertanggungjawab dalam membentuk sikap politik luar negeri Australia adalah faktor kepentingan nasional, geografis, sejarah dan kebudayaan, serta gaya kepemimpinan dari partai-partai yang berkuasa. Faktor-faktor itu meliputi lingkungan internal atau pada kotak A dan kotak B kerangka teori Snyder dkk. Ikrar Nusa Bhakti (Bhakti 2011) menambahkan, faktor-faktor domestik selain yang dikemukakan Hamid adalah cara pandang aktor politik (pemberi pengaruh, pembuat dan penentu kebijakan) terhadap sistem internasional, serta kepentingan dan peran yang diinginkan oleh negara tersebut di dalam sistem internasional.

Faktor-faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Australia

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, faktor-faktor internal yang membentuk kebijakan luar negeri Australia, yaitu : faktor kepentingan nasional, faktor geografis, faktor sejarah dan kebudayaan, faktor partai politik yang berkuasa, dan faktor aktor politik.

Kepentingan Nasional Australia

Kepentingan nasional Australia adalah memelihara keamanan wilayah dan menciptakan kesejahteraan bagi Australia dan warga negara Australia. (Department of Foreign Affairs and Trade 2003, vii). Australia juga aktif mempromosikan nilai-nilai

kebangsaannya seperti pemerintahan yang baik, hak azasi manusia, dan pembangunan. (Department of Foreign Affairs and Trade 2003, xviii).

Menurut Viviani (Viviani 2012) selama dekade 1950an – 1970an dan konsekuensi Perang Dingin berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat Australia. Rasa ketertutupan dan isolasi mereka terhadap dunia luar membentuk opini mereka bahwa orang Asia adalah asing bagi mereka atau dikatakan dengan istilah *the we/they syndrome*.

Berhubungan dengan pelaksanaan Colombo Plan dan New Colombo Plan, Viviani berpendapat (Viviani 2012, 81) dengan meningkatnya taraf kehidupan (ekonomi) penduduk di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, sedikit banyak akan mengurangi hasrat untuk bermigrasi ke Australia. Dengan demikian Australia merasa aman dari kemungkinan “serbuan migrasi” dari daerah berpenduduk padat tersebut.

Loughanne (Luoghanne 2013, 41) menambahkan, dalam kebijakannya partai koalisi bermaksud untuk membangun *people-to-people link* yang lebih kuat dengan negara-negara di kawasan Asia – Pasifik dan menghadirkan peluang yang besar bagi pemuda-pemuda Australia. Untuk merealisasikannya, Australia (melalui paket program New Colombo Plan) berencana mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya untuk ditempatkan di universitas-universitas mitra kebijakan agar mempelajari nilai-nilai dan budaya-budaya setempat dan meningkatkan hubungan *people-to-people* Australia dengan negara-negara lokasi penempatan.

Letak Geografis

Menurut Hamid (Hamid, Sistem Politik Australia 1999), geografi Australia menempati lokasi yang strategis di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, serta dikelilingi oleh dua samudra besar, yaitu samudra India dan samudra Pasifik. Samudra India yang mengapit sisi barat negeri ini merupakan jalur transportasi yang mengaitkan Australia dengan benua Afrika, anak benua India dan kawasan Asia Tenggara; sementara bagian timurnya yang dikelilingi oleh Samudra Pasifik menghubungkan negeri ini dengan bagian utara dan selatan benua Amerika. Selain itu, garis pantai utara benua Astralia juga

dipagari oleh pula-pulau Pasifik Selatan, dengan pulau New Guinea ... sebagai penyangga utamanya.

Letak geografis itu menempatkan Australia pada dua kemungkinan, benteng pertahanan atau titik kelemahan kelangsungan hidup Australia dan warga negaranya. Oleh karena itu, jika masih terdapat rasa ketertutupan dan isolasi mereka terhadap dunia luar, opini mereka bahwa orang Asia adalah asing bagi mereka atau dikatakan dengan istilah *the we/they syndrome* adalah merupakan kerugian.

Sejarah dan Kebudayaan

Masyarakat Aborigin dan Selat Torres merupakan penduduk asli Australia. Namun, kolonialisme yang dilakukan Inggris sejak abad ke-18 lalu menyebabkan pergeseran etnis dan budaya yang signifikan. Suku-bangsa asli Australia (Aborigin dan masyarakat Selat Tores) yang merupakan etnis mayoritas pada waktu itu tidak dapat bersaing dengan manusia dan budaya asal Inggris.

Dewasa ini tercatat terdapat 22.507.617 jiwa penduduk di Australia. Yang mana sembilan puluh dua persennya etnis berkulit putih, etnis Asia tujuh persen, dan satu persen adalah aborigin dan penduduk pribumi lainnya. Dari berbagai latarbelakang etnis itu, 76,8% penduduknya menuturkan bahasa Inggris, 1,6% bahasa Mandarin, 1,4% bahasa Italia, 1,3% bahasa Arab, 1,2% bahasa Yunani, 1,2% bahasa Kanton, 1,1% bahasa Vietnam, bahasa lainnya 10,4%, dan bahasa yang tidak teridentifikasi 5%. Selain itu, 28,8% warga Australia memeluk agama Kristen dengan berbagai sekenya, 25,3% pemeluk Katolik dengan berbagai sekenya, 4,5% penganut sekte Nasrani lainnya, 2,5% pemeluk Buddha, 2,2% Muslim, 1,3% Hindu, agama lainnya 8,5%, agama yang tidak teridentifikasi 2,2%, dan yang tidak beragama (*Atheist*) 22,3%. (Central Intelligence Agency t.thn.)

Berbanding dengan kawasan Asia – Pasifik yang meliputi negara-negara pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, Oseania, dan pesisir barat benua Amerika. Untuk menjembatannya, “Australia (melalui paket program New Colombo Plan) berencana mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya untuk ditempatkan di universitas-

universitas mitra kebijakan agar mempelajari nilai-nilai dan budaya-budaya setempat dan meningkatkan hubungan *people-to-people* Australia dengan negara-negara lokasi penempatan. (Luoghanne 2013, 41)”

Gaya Kepemimpinan Partai-partai Politik yang Berkuasa

Gaya kepemimpinan partai politik yang berkuasa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah partai koalisi Liberal – Nasional. Pada kampanyenya, partai koalisi menjanjikan peningkatan *people-to-people link* yang berarti memberikan kesempatan yang besar bagi mahasiswa Australia. Program ini dilaksanakan dalam kerangka NCP yang mengirim mahasiswa-mahasiswa terbaik Australia untuk belajar, menetap, dan magang di universitas-universitas di negara-negara yang menjadi mitra strategis Australia di kawasan Asia – Pasifik. Dengan penyediaan beasiswa, mahasiswa-mahasiswa tersebut dapat lebih mengenal kebudayaan-kebudayaan baru di luar Australia dan berharap memberikan kontribusi sekembalinya dari sana. (Luoghanne 2013)

Kemenangan partai koalisi dalam pemilu 2013 memudahkan rencana pelaksanaan New Colombo Plan. Partai koalisi memperoleh 6.908.710 suara atau setara dengan 53,49% dan berhasil mengamankan 90 kursi dalam parlemen Australia. Sementara itu pada pemilihan Senat, Sebanyak 5.057.218 warga menggunakan suaranya untuk memilih wakil koalisi Partai Liberal – Nasional.

Faktor Aktor Politik

Faktor berikutnya yang mempengaruhi politik luar negeri Australia mengenai New Colombo Plan adalah aktor politik (elit politik). Elit politik yang berkepentingan dalam kebijakan ini adalah Perdana Menteri, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Australia, dan Wakil Ratu Inggris untuk Australia (Gubernur Jenderal).

Pada tanggal 10 Desember 2013 New Colombo Plan secara resmi telah diluncurkan. Dalam kesempatan itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Julie Bishop di Gedung Parlemen, Canberra, dan disaksikan pula oleh Gubernur Jenderal, Quentin Bryce

dan wakil Ketua Oposisi, Tanya Plibersek. Selanjutnya, pemerintah Australia, termasuk Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) yang bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Australia, dalam 5 tahun pertama menyediakan dana 100 juta dolar AS untuk mendukung NCP. Melalui New Colombo Plan, pemerintah Australia menyediakan beasiswa dan menyokong pendidikan serta kolaborasi lainnya bagi mahasiswanya. Empat puluh mahasiswa S1 terbaik dan tercerdas Australia memperoleh beasiswa *New Colombo Plan* dari Pemerintah Australia yang memberi mereka kesempatan untuk tinggal, menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman kerja di Jepang, Hongkong, Singapura, dan Indonesia.

Konstelasi Politik, Ekonomi, dan Keamanan Internasional

Keterlibatan Australia dalam Colombo Plan dan gagasannya mengenai New Colombo Plan merupakan kesadaran Australia memahami letak geografis negaranya dengan negara-negara lain di dalam satu kawasan. Australia merupakan negara sebesar benua yang dihuni mayoritas warga keturunan eropa, berbeda dengan negara-negara tetangganya yang merupakan penduduk asli Asia – Pasifik.

Politik luar negeri Australia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dua negara adikuasa, yaitu Inggris dan Amerika Serikat. “Politik luar negeri Australia sejak federasi 1901 sampai PD II 1942 merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Pemerintah Kerajaan Inggris. (Hamid, Sistem Politik Australia 1999, 395)” Kemudian “politik luar negeri Australia paska-Perang Dunia Kedua sesungguhnya lebih kental dengan nuansa pro-Amerika. Kecenderungan ini tidak bisa dilepaskan dari mayoritas penduduknya yang berkulit putih. (Cipto 2010, 192)”

Untuk mengurangi ketergantungan Australia kepada mitra sekutu tradisionalnya, Australia meningkatkan hubungan perdagangan internasionalnya. Bergabungnya Inggris ke dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) merupakan faktor utama bagi Australia membuka hubungan perdagangan internasional di kawasan Asia – Pasifik. Oleh karena alasan itu, Australia mulai aktif melibatkan diri dengan negara-negara di kawasan Asia

Pasifik, melalui kerjasama dengan negara-negara Asia Timur dan ikut serta dalam forum dan komisi negara-negara Pasifik Selatan.

Kesadaran Australia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, terisolasi, berpenduduk jarang dan berbeda dengan penduduk negara-negara tetangganya. Fenomena itu memberi perhatian utama bagi keamanan Australia. Terutama di wilayah utara negaranya, Australia menganggap pulau-pulau di wilayah tersebut bermakna strategis. “Sebagai benteng pertahanan dari invasi musuh, yang sekaligus sebagai titik kelemahan utamanya. (Hamid, Sistem Politik Australia 1999, 388)”

Opini Australia bahwa orang Asia adalah asing bagi mereka atau dikatakan dengan istilah *the we/they syndrome*, maka melalui Colombo Plan dan New Colombo Plan persepsi tersebut dapat terkikis. Jika keikutsertaan Australia sebagai negara sponsor utama dalam Colombo Plan dianalisis lebih mendalam, hal itu dapat dilihat sebagai bagian atau perwujudan strateginya menghadapi negara-negara Asia. Dengan meningkatnya taraf kehidupan (ekonomi) penduduk di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, sedikit banyak akan mengurangi hasrat untuk bermigrasi ke Australia. Dengan demikian Australia merasa aman dari kemungkinan “serbuan migrasi” dari daerah berpenduduk padat tersebut.

New Colombo Plan merupakan inisiatif tanda tangan dari Pemerintah Australia yang bertujuan untuk mengangkat pengetahuan tentang Indo Pasifik di Australia dengan mendukung mahasiswa Australia untuk belajar dan melakukan magang di wilayah tersebut. Australia berencana mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya untuk ditempatkan di universitas-universitas mitra kebijakan agar mempelajari nilai-nilai dan budaya-budaya setempat dan meningkatkan hubungan *people-to-people* Australia dengan negara-negara lokasi penempatan.

Kesimpulan

Gagasan New Colombo Plan sebagai kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor itu adalah : kepentingan nasional, geografis, sejarah dan kebudayaan, gaya kepemimpinan partai politik yang

berkuasa, aktor politik, kondisi geografis dan demografis kawasan Asia – Pasifik, serta konstelasi politik, ekonomi, dan keamanan internasional.

Perbedaan geografis dan demografis mendukung kebijakan luar negeri Australia mengenai New Colombo Plan. Kesadaran akan kemajemukan wilayah dan penduduk membuat sikap dan arah kebijakan luar negeri Australia kepada kawasan Asia – Pasifik. Identitas bangsa kulit putih dan keterlibatannya dengan negara-negara sekutu Baratnya membuat Australia tergantung kepada mereka. Akan tetapi, pasang-surut kawasan Asia – Pasifik membentuk kebijakan luar negeri Australia ke arah negara-negara di kawasan Asia – Pasifik. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan relasi tradisionalnya dengan negara-negara sekutu, sekaligus membuka mitra baru kerjasama internasional. Sehingga, jangkauan kebijakan luar negeri Australia meliputi pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, Oseania, dan pesisir barat benua Amerika.

Politik luar negeri Australia yang beturut-turut bergantung kepada Inggris (1901 – 1942) dan Amerika Serikat (paska-Perang Dunia Kedua) membuat kebijakannya bersifat statis. Oleh karena itu, Australia memusatkan kepentingan nasionalnya dalam bidang perdagangan internasional. Hal itu dimulai sesudah bergabungnya Inggris ke dalam MEE yang membuat pasar perdagangan Australia mampu menembus Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia.) Maka sudah semestinya kebijakan luar negeri Australia mengenai New Colombo Plan ditujukan di empat lokasi negara program percontohan, yaitu Indonesia, Singapura, Hongkong, dan Jepang.

Sepanjang berdirinya, Australia mendekati diri dengan kekuatan-kekuatan sekutunya seperti Inggris dan Amerika Serikat. Ketergantungan ini membentuk sikap mendua, keamanan Australia terlindungi dan opini masyarakat Australia terhadap negara-bangsa diluar Amerika Serikat menjadi negatif. Bahkan mereka beranggapan bahwa orang Asia adalah asing bagi mereka atau dikatakan dengan istilah *the we/they syndrome*.

Oleh karena itu, dari hasil analisa diketahui bahwa program Colombo Plan dan New Colombo Plan membentuk opini baru masyarakat Australia, yaitu sebagai bagian atau perwujudan strateginya menghadapi negara-negara Asia. Sehingga, Australia merasa

aman dari kemungkinan ancaman dan keterasingan dari negara-negara sekitarnya. Atau dengan kata lain, Australia (melalui paket program New Colombo Plan) berencana mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya untuk ditempatkan di universitas-universitas mitra kebijakan agar mempelajari nilai-nilai dan budaya-budaya setempat dan meningkatkan hubungan *people-to-people* Australia dengan negara-negara lokasi penempatan.

Kemenangan partai koalisi dalam pemilu 2013 itu selain menggagalkan upaya Partai Buruh kembali menguasai pemerintahan, juga memudahkan rencana pelaksanaan New Colombo Plan. Elit politik yang berkepentingan dalam kebijakan ini adalah Perdana Menteri, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Australia, dan Wakil Ratu Inggris untuk Australia (Gubernur Jenderal).

Pada tanggal 10 Desember 2013 New Colombo Plan secara resmi telah diluncurkan. Dalam kesempatan itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Julie Bishop di Gedung Parlemen, Canberra, dan disaksikan pula oleh Gubernur Jenderal, Quentin Bryce dan wakil Ketua Oposisi, Tanya Plibersek. Selanjutnya, pemerintah Australia, termasuk Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) yang bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Australia, dalam 5 tahun pertama menyediakan dana 100 juta dolar AS untuk mendukung NCP. Pada tanggal 25 Juni 2014, daftar mahasiswa terbaik yang berhak mengikuti NCP diumumkan. Empat puluh mahasiswa S1 terbaik dan tercerdas Australia memperoleh beasiswa *New Colombo Plan* dari Pemerintah Australia yang memberi mereka kesempatan untuk tinggal, menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman kerja di Jepang, Hongkong, Singapura, dan Indonesia.

REFERENSI

- Bhakti, Ikrar Nusa. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Australia dan Pertahanan Australia." In *Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia : Pemerintahan John Howard dari Partai Koalisi Liberal (1996-2007) dan Pemerintahan Kevin Rudd dari partai Buruh (2007-2010) [Skripsi]*, by Christa Mc Auliffe Suryo Putri. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Bishop, Julies. *The New Colombo Plan Rountable*. 22 Maret 2013. <http://www.juliebishop.com.au/the-new-colombo-plan-rountable/> (diakses Mei 16, 2016).
- Central Intelligence Agency. *The World Factbook Australia*. n.d. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html> (accessed Maret 14, 2015).
- Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara : Teropong terhadap Dinamika, Kondisi Riil, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Department of Foreign Affairs and Trade. *Advancing The National Interest : Australia's Foreign and Trade Policy Whitepaper*. Canberra: Commonwealth of Australia, 2003.
- . *New Colombo Plan*. n.d. <http://dfat.gov.au/people-to-people/new-colombo-plan/pages/new-colombo-plan.aspx> (accessed Maret 20, 2016).
- Derana, Ada. *Exclusive : Organised People Smuggling business and Not A Refugee Issue - Australian Liberal party*. September 4, 2013. <http://www.adaderana.lk/news.php?nid=23957> (accessed Mei 16, 2016).
- Hamid, Zulkifli. *Sistem Politik Australia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff Jr. "Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey [Third Edition]." In *Teori-teori Hubungan Internasional: Sebuah Survai Komprehensif*, by Bambang Wahyu Nugroho, 367. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi, Penerbitan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.

Luoghanne, Brian. *Our Plan Real Solutions for All Australian : The Direction, Values and Policy Priorities of The Next Coalition Government*. Australia Capital Territory: Bambra Press, 2013.

Mas'ood, Mohtar. *Studi Ilmu Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas - Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989.

Nitisha. *Political Science Notes*. n.d.
<http://www.politicalsciencenotes.com/articles/eastons-model-and-its-feedback/739>.

Secretariat, The Colombo Plan. *Overview*. 2011. <http://www.colombo-plan.org/index.php/about-cps/overview/> (accessed Desember 4, 2015).

Viviani, N. "Australia's Future in Asia : People, Politics, and Culture." In *Sejarah Australia : Dari Terbentuknya Commonwealth of Australia sampai dengan Terbentuknya Kerjasama Regional dengan Negara-negara Asia dan Pasifik*, by Julius Siboro, 81. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

